

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah ekonomi di Indonesia merupakan kajian yang menggunakan teori ekonomi untuk merumuskan hipotesa awal untuk mendapatkan hal yang historis melalui data statistika yang ada¹. Pada masa kini hampir semua negara memiliki bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Hal ini bank sentral lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan memengaruhi kegiatan ekonomi negara, kebijakan yang dapat dijalankan bank sentral yang bersifat makroekonomi, seperti: Kebijakan moneter, menekan inflasi, dan menjaga nilai tukar mata uang.² Di banyak negara mata uang menjadi tantangan utama dalam menjaga sistem nilai tukar, mata uang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara-bangsa. Selain sebagai alat transaksi ekonomi, mata uang nasional juga menjadi simbol kedaulatan negara serta instrumen utama dalam kebijakan moneter dan fiskal.³

¹ Luiten V. Zanden & Daan Marks. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800-2010*. Jakarta; Buku Kompas, 2012. Hlm. 3.

² Sadono Sukirno. (2008). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan. Hlm. 283-287.

³ Gilbert, Helleinder, Eric.1999. *Nation States and Money The Past Present, and Future of National currencies*. Routledge Taylor and Francis Grup. Hlm. 5.

Sejarah ekonomi Indonesia sangat terkait erat dengan masa kolonial Belanda, ketika Nusantara menjadi pemasok utama komoditas berharga bagi pasar global pada abad ke-17, melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada yang dimana komoditas ini sangat diminati di pasar Eropa karena harganya yang tinggi.

Ruang lingkup moneter Belanda di Nusantara pada awalnya dibebankan oleh NHM (*Nederlands Handels Maatschappij*) sejak awal dibentuknya lembaga tersebut pada tahun 1824, operasi perbankan hanya dilakukan oleh perusahaan tersebut yang dimana cadangan modalnya (emas juga perak) yang terbatas.⁴ Dengan berbagai pertimbangan Pemerintah Hindia Belanda berencana mendirikan suatu lembaga perbankan yang dapat mencetak uang kertas, untuk mengatasi kesulitan dalam keuangan. Dengan berbagai pertimbangan dan kondisi ini *De Javasche Bank* didirikan pada tahun 1828 di Hindia Belanda dengan modal yang sangat terbatas.⁵ *De Javasche Bank* merupakan satu-satunya lembaga perbankan yang mengatur sirkulasi mata uang, dan menyimpan modal sebagai jaminan mata

⁴ Peter Creutzberg & Van Laanen (1987). *Perbankan, Sistem Kredit dan Nilai Tukar*. Dalam buku “Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia”. Hlm. 344.

⁵ Aziza Fajar Safitri. (2018) *Dampak Pendirian Agenstchap Van de Javasche Bank te Djokdjakarta Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Yogyakarta Tahun 1880-1940*. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol. 3 No. 4. Hlm. 476.

uang Gulden.⁶ *De Javasche Bank* mulai mendirikan berbagai cabang, salah satunya di Makassar pada 29 Agustus 1864 bank dengan gaya eropa dengan nama *De Javasche Bank Agentschap Makassar*. *De Javasche Bank* cabang Makassar juga menjadi akses utama pengusaha asing, seperti Tionghoa, hal ini peran *De Javasche Bank* dalam pengaturan ekonomi lebih luas di Makassar dan sekitarnya. *De Javasche Bank* bukan hanya sekadar perbankan tetapi juga alat yang digunakan pemerintah kolonial untuk mempertahankan dan mengatur ekonomi lokal.⁷ berkembang dalam bidang pemberian kredit kepada para pedagang yang berhubungan dengan pengelolaan Sistem Tanam Paksa. *De Javasche Bank* di Makassar mulai praktis mulai memberikan kredit pada akhir abad ke-19.⁸

Selama pendudukan Jepang *De Javasche Bank* ditutup karena semua bank milik Belanda dibekukan. Jepang, sebagai penguasa baru, menutup *De Javasche Bank* dan mengambil alih asetnya pada 1942. *De Javasche Bank*, bersama bank-bank Belanda lainnya, kemudian digantikan oleh bank-bank Jepang, seperti *Nanpo Kaihatsu Ginko*, yang berfungsi sebagai bank sirkulasi selama pendudukan. Setelah proklamasi kemerdekaan Pada 7 Maret 1942, Administrasi Militer Jepang mengeluarkan peraturan yang memerintahkan penghentian semua operasi

⁶ Peter Creutzberg & Van Laanen (1987). Hlm 315.

⁷ Yerry Wirawan, (2013). *Masyarakat Tionghoa Makassar Pada Abad 1720*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia., Hlm. 138.

⁸ Rasyid Asba (2007). *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Regional di Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 171.

perbankan di Jawa dan memaksa peredaran uang kertas militer, namun masih mengizinkan peredaran uang kertas yang diterbitkan oleh *De Javasche Bank* sebelumnya, serta uang kertas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nilai yang diizinkan untuk uang kertas militer ini setara dengan kedua uang yang sebelumnya berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.⁹

Pada Agustus 1945, Sistem ekonomi mengalami kelumpuhan, dan infrastruktur penting seperti transportasi dan komunikasi berada dalam keadaan terpuruk. Pemerintahan yang baru saja dibentuk oleh pihak Sekutu, melalui *Netherlands-Indies Civil Administration* (NICA), membawa sejumlah perubahan signifikan, salah satunya adalah penerapan mata uang yang baru sebagai bagian dari kontrol ekonomi dan politik yang lebih luas.¹⁰ Yang dimana suasana pada masa itu tidak hanya satu mata uang yang beredar, ada uang yang di cetak oleh pihak Republik yang dikeluarkan oleh para penguasa daerah dan ada juga sisa mata uang pendudukan jepang dan ada juga uang yang dikeluarkan oleh *De Javasche Bank* yang masing masing mempunyai nilai tersendiri terhadap barang.¹¹

Negara Indonesia Timur (NIT) yang terbentuk pada 24 Desember 1946 melalui Konferensi Denpasar, sebagai bagian dari strategi Belanda untuk

⁹ Shibata Yoshisama. (1996). *The Monetary Policy In The Netherlands East Indies Under The Japanese Administration*. BKI: 152-6. Hlm 177.

¹⁰ Rasyid Asba, *et.al.* (2019). *Pusat Ekonomi Maritim Makassar peran Bank Indonesia di Sulawesi Selatan*. ed. Kasjianto Sastrodinomo *Jakarta: Bank Indonesia Institute*. Hlm. 155.

¹¹ Boediono.(2016). *Ekonomi Indonesia Dalam Lintaasan Sejarah*. Bandung: Penerbit Mizan. Hlm 73.

membentuk negara federal di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.¹² NIT mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, dengan Makassar sebagai pusat pemerintahan. NIT memiliki beberapa kabinet selama masa berdirinya, di antaranya adalah kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa pada 1947-1949. Menteri Keuangan NIT pada saat itu, M. Hamelink dan juga selaku *Agentschap De Javasche Bank* cabang makassar menyatakan dalam konferensi pers nya, *De Javasche Bank* sebuah lembaga sirkulasi keuangan negara.¹³ NIT diakui sebagai salah satu dari negara bagian resmi ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk pada 27 Desember 1949, namun masa keberadaannya tidak berlangsung lama. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan, dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, mengakhiri eksistensi NIT.¹⁴

Mata uang menjadi sebuah hal penting dalam kesejarahaan ekonomi Indonesia, namun masih sedikit literatur mengenai bagaimana penggunaan mata uang di Negara Indonesia Timur 1946-1950 dan apa yang mendasarinya serta mengapa mata uang mampu menjadi hal penting dalam penggerak ekonomi Negara Indonesia Timur 1946-1950. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, peneliti akan menjabarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam penelitian ini.

¹² Harry Poeze & H.S, Nordholt. (2023). *Merdeka: Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik Yang Tak Pasti 1945-1950*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia., Hlm. 271.

¹³ Rasyid Asba *et.al*, Hlm 157.

¹⁴ Ide Anak Agung Gde. (1985). *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., Hlm. 181.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas maka diperlukan beberapa rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian:

1. Mengapa pemerintah Negara Indonesia Timur mempertahankan pengendalian mata uang tertentu setelah berbagai jenis uang beredar pasca pendudukan Jepang.

1.3 Batasan Masalah

Batasan terhadap penelitian “Penggunaan Mata uang di Negara Indonesia Timur 1946-1950” menggunakan batasan temporal untuk menjaga fokus penelitian dalam rentang waktu yang ditentukan secara mendalam. Agar dapat fokus dalam penelitian ini batasan masalah dalam historiografi terbagi menjadi dua yaitu batas waktu (temporal) dan batasan tempat (spasial). Batasan-batasan ini dibuat sedemikian rupa untuk menunjang penelitian dipusatkan pada bidang tertentu. Pembatasan juga dilakukan agar penelitian lebih berfokus pada penulisan.

1. **Batasan Spasial:** Fokus penelitian ini adalah wilayah Negara Indonesia Timur, dengan titik berat di Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar. Daerah ini dipilih karena memiliki sejarah ekonomi yang erat kaitannya dengan aktivitas peredaran mata uang, serta posisi menjadi bagian dari struktur ekonomi NIT, juga peran *De Javasche Bank* dalam konteks mengatur sirkulasi mata uang di wilayah Indonesia Timur.

2. **Batasan Temporal:** Penelitian ini dibatasi pada periode 1946-1950, yakni masa setelah pasca pendudukan Jepang di Makassar 1945 dan berdirinya Negara Indonesia Timur setelah Konferensi Denpasar pada tanggal 24 Desember 1946, sampai pada gabungannya NIT ke RIS hal ini eksistensi penggunaan mata uang di NIT telah berganti dan mengikuti kebijakan RIS.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mata uang yang sah dan di atur oleh pemerintahan Negara Indonesia Timur.
2. Untuk mengetahui apa saja jenis mata uang yang beredar di Negara Indonesia Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian sejarah ekonomi-politik Indonesia dengan menawarkan analisis tentang Penggunaan Mata Uang di Negara Indonesia Timur.
2. Dapat dijadikan rujukan oleh penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian yang Relevan

Dalam buku “**Gedung Bank Indonesia: Jejak Arsitektur dalam Menggapai Kemakmuran Negeri**” yang disusun oleh Nadia Purwestri dan tim

dari Bank Indonesia pada tahun 2012, penulis menggunakan pendekatan sejarah arsitektur untuk menggambarkan perkembangan peran Bank Indonesia dalam perjalanan ekonomi nasional. Buku ini mengeksplorasi jejak arsitektur gedunggedung Bank Indonesia yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, sebagai simbol kemajuan ekonomi bangsa sejak masa kolonial hingga era modern. menelusuri perkembangan arsitektur gedung Bank Indonesia sebagai simbol kemajuan ekonomi bangsa dari masa kolonial hingga modern. Purwestri menggarisbawahi peran *De Javasche Bank* (DJB) dalam mengatur ekonomi kolonial serta bagaimana transisi bangunan ini melambangkan perubahan dari lembaga kolonial menjadi bank sentral nasional setelah kemerdekaan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan moneter di berbagai kota besar di Indonesia

Kesimpulan dari karya tim bank Indonesia ini menggarisbawahi bahwa gedung-gedung Bank Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan perbankan dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan peran penting Bank Indonesia dalam menggerakkan perekonomian nasional. Detail arsitektur yang ditampilkan, mulai dari gaya kolonial hingga modern, menunjukkan dinamika perubahan peran Bank Indonesia, dari masa *De Javasche Bank* hingga menjadi bank sentral setelah kemerdekaan. Dokumentasi arsitektur ini menambah pemahaman mengenai bagaimana nilai sejarah, budaya, dan ekonomi terintegrasi dalam bangunanbangunan tersebut, menjadikannya sebagai simbol kemakmuran dan kemajuan bagi negeri.

Buku yang ditulis oleh Yerry Wirawan (2013), "**Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari Abad ke-17 Hingga ke-20**", menyajikan analisis mendalam mengenai interaksi antara masyarakat Tionghoa dan lembaga keuangan kolonial, khususnya DJB, yang memainkan peran sentral dalam pengaturan ekonomi pada masa tersebut. Penelitian ini menggarisbawahi bagaimana DJB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memengaruhi struktur ekonomi masyarakat Tionghoa di Makassar. DJB, yang didirikan pada tahun 1824, berperan penting dalam pengaturan sirkulasi uang dan pemberian kredit di Hindia Belanda. Dalam konteks masyarakat Tionghoa, Wirawan menjelaskan bahwa DJB menjadi akses utama bagi pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka.

Namun, mekanisme akses terhadap kredit yang dikelola oleh DJB sering kali menguntungkan pengusaha kolonial dan memperkuat dominasi ekonomi mereka. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi di kalangan pengusaha Tionghoa yang ingin bersaing dalam industri dan perdagangan.

Penulis menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat Tionghoa dan DJB dipenuhi dengan ketegangan. Di satu sisi, DJB menyediakan akses keuangan yang esensial bagi pengusaha Tionghoa, tetapi di sisi lain, kebijakan bank tersebut seringkali menciptakan batasan yang merugikan mereka. Misalnya, DJB menerapkan regulasi ketat yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha Eropa, sehingga mengakibatkan pengusaha Tionghoa kesulitan untuk mendapatkan akses kredit yang memadai. Akibatnya, banyak pengusaha Tionghoa terjebak dalam siklus ketergantungan yang membuat mereka sulit untuk mengembangkan usaha

secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, Wirawan juga menggarisbawahi peran DJB dalam pengaturan ekonomi serta mata uang yang lebih luas di Makassar dan sekitarnya. DJB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai alat politik yang memperkuat kontrol pemerintah kolonial atas masyarakat Tionghoa dan sektor ekonomi lokal. Dalam hal ini, DJB berkontribusi terhadap pembentukan struktur ekonomi yang tidak seimbang, di mana kepentingan ekonomi pusat mendominasi daerah. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang membuat masyarakat Tionghoa semakin terpinggirkan. Kesimpulan dari analisis Wirawan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Tionghoa memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi Makassar, posisi mereka tetap rentan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh DJB. Buku ini menyimpulkan bahwa keberadaan DJB sebagai lembaga keuangan kolonial berimplikasi langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa, yang berusaha untuk mengatasi tantangan struktural dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang diatur oleh kekuatan kolonial.

Dengan demikian, tinjauan ini memperlihatkan betapa pentingnya memahami peran DJB dalam konteks sejarah masyarakat Tionghoa di Makassar. DJB bukan hanya sekadar lembaga perbankan, tetapi juga alat yang digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaan dan mengatur ekonomi lokal. Penelitian ini menjadi kontribusi penting bagi pemahaman tentang bagaimana lembaga keuangan kolonial seperti DJB membentuk lanskap ekonomi dan sosial di Indonesia, serta dampaknya terhadap komunitas-komunitas etnis, termasuk masyarakat Tionghoa di Makassar.

Buku E. L. Poelinggomang “**Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim**”, (2002) membahas secara mendalam tentang kebijakan perdagangan maritim yang diterapkan di Makassar selama abad ke-19 dan dampaknya terhadap dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Di antara berbagai lembaga yang berperan dalam sistem perdagangan serta transaksi keuangan di sektor perdagangan. Poelinggomang menjelaskan bahwa DJB, yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1828, memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan maritim. Sebagai lembaga perbankan yang berfungsi sebagai pengatur sirkulasi uang dan pemberi kredit, DJB memfasilitasi kebutuhan finansial bagi pengusaha di Makassar. Buku ini mencatat bahwa banyak pengusaha Tionghoa dan lokal yang bergantung pada DJB untuk mendapatkan modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha mereka, terutama dalam konteks perdagangan yang kompetitif di Pelabuhan. Namun, meskipun DJB menyediakan akses keuangan, penulis juga menunjukkan bahwa kebijakan bank ini sering kali lebih menguntungkan pengusaha Eropa dibandingkan dengan pengusaha lokal dan Tionghoa. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang ketat dan syarat-syarat pemberian kredit yang cenderung berpihak kepada kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah kolonial. Akibatnya, banyak pengusaha lokal dan Tionghoa mengalami kesulitan dalam mengakses modal yang dibutuhkan untuk bersaing dalam industri dan perdagangan. Ketergantungan ini menciptakan struktur ekonomi yang tidak seimbang di mana kekuasaan ekonomi terpusat pada pengusaha Eropa.

Secara keseluruhan, “Makassar Abad XIX” oleh Poelinggomang menawarkan wawasan penting tentang interaksi antara lembaga keuangan kolonial dan praktik perdagangan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi komunitas di Makassar. Penelitian ini sangat relevan bagi para akademisi, peneliti, dan pembaca yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang sejarah ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan maritim dan peran DJB sebagai lembaga yang mengatur dan mempengaruhi dinamika ekonomi di Makassar pada abad ke-19.

Studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Institute (2019), **Pusat Ekonomi Maritim Makassar Peran Bank Indonesia di Sulawesi Selatan**, perekonomian Indonesia diulas secara mendalam, khususnya sebagai bank sirkulasi utama selama masa kolonial dan awal kemerdekaan. DJB didirikan pada tahun 1828 sebagai bank sentral Hindia Belanda, bertugas mengelola peredaran mata uang gulden dan menyediakan kredit bagi perdagangan serta industri yang berbasis ekspor. Studi ini menyoroti bahwa DJB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertahankan dominasi ekonomi kolonial di Indonesia, terutama di daerah-daerah strategis seperti Makassar, yang menjadi pusat perdagangan maritim di Indonesia Timur. Selama masa pendudukan Belanda di Indonesia Timur, DJB memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan kolonial. Pada masa ini, DJB difungsikan kembali setelah sempat ditutup oleh Jepang selama Perang Dunia II. Setelah pembukaan kembali kantor DJB di Makassar pada Oktober 1945, DJB bertugas menggantikan mata uang Jepang yang beredar dengan

gulden Belanda untuk menstabilkan ekonomi lokal. Upaya ini didukung dengan bantuan pasukan Australia yang menjamin keamanan operasi bank tersebut. DJB juga memimpin berbagai kebijakan fiskal di Negara Indonesia Timur (NIT) untuk mempertahankan dominasi ekonomi Belanda dan memperkuat posisi Makassar sebagai pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia. Selain mengelola mata uang, DJB terlibat dalam pengaturan kebijakan moneter dan perbankan di NIT, dengan Menteri Keuangan pertama NIT, M. Hamelink, yang juga menjabat sebagai Kepala Cabang DJB di Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bagaimana DJB tidak hanya sekadar lembaga perbankan, tetapi juga alat politik-ekonomi Belanda untuk mempertahankan pengaruh di kawasan Indonesia Timur hingga awal kemerdekaan. DJB berperan penting dalam membangun fondasi sistem keuangan Indonesia, yang kemudian diteruskan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional setelah kemerdekaan.

Studi lain yang relevan adalah penelitian oleh Bank Indonesia Institute (2019), yang menyoroti peran *De Javasche Bank* Makassar sebagai penggerak ekonomi di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar, pusat ekonomi maritim di Indonesia Timur. Menurut Juhro et al. (2019), Penggunaan mata uang untuk pembentukan jalur ekonomi Makassar sangat penting pada tahun 1864. Melalui layanan kredit, bank ini berperan dalam mendukung perdagangan ekspor barang lokal seperti kopra dan beras, serta memodernisasi perbankan dan pembayaran di wilayah tersebut. Selain itu, bank ini menjadi cikal bakal Bank Indonesia yang sekarang berperan sebagai otoritas moneter.

Penelitian ini mengilustrasikan bagaimana penggunaan mata uang mendukung kestabilan ekonomi dengan mengelola sirkulasi mata uang dan kredit selama masa kolonial. *De Javasche Bank* Makassar berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi ganda, baik sebagai bank komersial maupun bank sirkulasi yang mengatur moneter di daerah timur Hindia Belanda. Peran historis ini terus berkembang seiring peralihan bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, yang kemudian mengawal stabilitas ekonomi wilayah Timur Indonesia melalui kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan pengaturan sistem pembayaran regional. Dalam konteks Negara Indonesia Timur,

Buku **Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat** Karya Ide Agung Gde (1985), memberikan detail mengenai pembentukan, struktur, dan pengaruh politik NIT selama periode RIS, serta memberikan memperkenalkan kabinetnya yang disusun oleh Nadjamudin Daeng Malewa yang terdiri dari 9 menteri, Menteri keuangan yang ditunjuk saat itu ialah M. Hamelink sebagai *Agentschapp* (Agen yang berfungsi sebagai sarana bagi pelanggan untuk mengakses layanan) *De Javasche bank* di Makassar. Secara administratif, NIT mencakup wilayah-wilayah di Indonesia Timur, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, dengan ibu kota di Makassar. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh lokal, NIT berfungsi sebagai pusat administrasi dan ekonomi di wilayah timur, terutama sebagai penghubung ekonomi maritim yang strategis bagi Belanda. Ide federalisme ini juga mencerminkan upaya Belanda untuk mempertahankan kendali ekonomi di Indonesia, di mana lembaga-lembaga kolonial, seperti *De Javasche*

Bank (DJB), memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan sirkulasi mata uang di wilayah tersebut

Artikel yang berjudul **“Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan: Makassar sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950”**, mengeksplorasi peran Makassar sebagai pusat administrasi dan ekonomi bagi Negara Indonesia Timur (NIT). Dengan status sebagai ibu kota, Makassar mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang mencakup pembangunan infrastruktur kota serta perubahan dalam dinamika sosial masyarakat perkotaan. Ilham juga menyoroti bagaimana Makassar menjadi pusat ekonomi maritim yang strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan dan kebijakan ekonomi yang lebih luas di Indonesia Timur. Kota Makassar juga menyanggah status tertinggi saat ditetapkan sebagai ibukota NIT. Sebuah ibukota negara yang mendasarkan birokrasi pemerintahan di satu sisi pada kelompok penguasa tradisional. Di sisi lain, perangkatnya diisi oleh orang-orang ‘baru’ yang memperoleh kedudukan terutama karena pendidikan. Pihak Belanda sendiri, menegaskan bahwa pemerintahan NIT harus dikelola secara modern.

Buku yang berjudul *Nation-States and Money The past, present and future of national currencies. Dalam periode 1945-1950.*, Dalam konteks Negara Indonesia Timur pada periode 1945-1950, sistem mata uang mengalami berbagai dinamika akibat perubahan politik dan ekonomi yang terjadi pasca kemerdekaan, penggunaan mata uang pada periode 1945-1950 mencerminkan konflik antara upaya Republik Indonesia dalam menegaskan kedaulatan ekonomi dan intervensi kekuatan kolonial Belanda yang masih berusaha mempertahankan pengaruh moneter mereka melalui

mata uang NICA. Negara Indonesia Timur (NIT) yang menghadapi tantangan dalam mengelola sistem mata uang yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan integrasi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan analisis dalam literatur bahwa pembangunan mata uang nasional sering kali menjadi bagian dari strategi negara untuk memperkuat kontrol politik dan ekonomi di wilayahnya.

Artikel yang berjudul **“The Monetary Policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration”**, menjelaskan yang dimana Jepang mendirikan *Nanpo Kaihatsu Kinko* pada tahun 1943, yang bertindak sebagai bank penerbit dan berfungsi menyediakan dana bagi perusahaan Jepang di wilayah pendudukan. Pendirian SDB menggantikan uang militer dengan uang kertas baru yang diterbitkan oleh SDB, yang mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar secara drastis. Hal ini memicu inflasi besar-besaran di Hindia Belanda, yang berdampak langsung pada kestabilan ekonomi lokal, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Jawa dan Sumatra. Selain itu, Jepang memberlakukan penyitaan terhadap bank-bank Belanda, seperti *De Javasche Bank*, dan melikuidasi atau mengintegrasikan bank-bank tersebut ke dalam sistem perbankan Jepang. Hanya beberapa bank yang berafiliasi dengan Jepang yang diizinkan untuk beroperasi kembali, dan distribusi kredit diarahkan untuk mendukung perusahaan-perusahaan Jepang yang baru berdiri di Hindia Belanda. Strategi dimaksudkan untuk mendominasi ekonomi lokal dan menjaga aliran modal sesuai dengan kepentingan Jepang. Namun, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berhasil dalam menjaga kestabilan moneter. Pada tahap akhir pendudukan, inflasi yang tak terkendali melanda Hindia Belanda, mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat lokal.

Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang masih digunakan dalam waktu singkat oleh pihak Sekutu, tetapi akhirnya dihentikan peredarannya pada tahun 1946 oleh pemerintahan Indonesia yang baru.

Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan, yang ditandai dengan transisi dari kolonialisme ke negara merdeka dengan bentuk pemerintahan federal. Menurut **Merdeka: Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik yang Tak Pasti, 1945 (2023)**, masa ini adalah periode yang penuh tantangan bagi Republik Indonesia yang baru berdiri, karena harus menghadapi ketidakpastian politik, tekanan ekonomi, dan konflik sosial yang meluas. Pembentukan RIS adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan pada tahun 1949 antara Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia diakui sebagai negara merdeka, namun dengan struktur federasi yang terdiri dari negara-negara bagian, termasuk Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Sumatera Timur, dan Negara Pasundan. Bentuk federal ini pada awalnya diharapkan dapat menjaga stabilitas dan mengakomodasi berbagai kepentingan regional, tetapi justru menimbulkan ketegangan antara pemerintah pusat di Jakarta dan negara-negara bagian yang cenderung memiliki otonomi. Secara ekonomi, RIS menghadapi masalah ketergantungan pada lembaga-lembaga kolonial, seperti *De Javasche Bank* yang tetap berfungsi sebagai bank sentral untuk mengatur keuangan negara.

Buku **Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia**, Karya Peter Cruetzber (1987) khususnya pada bab 10 menjelaskan tentang keuangan, sistem perbankan,

kebijakan nilai tukar pada masa Hindia-Belanda, yang dimana pada mulanya aspek utama operasi Bank terdiri atas kegiatan diskonto surat berharga (*promissory notes*) yang dikeluarkan oleh pembeli barang impor dengan permintaan importir. Pada abad ke-19, *De Javasche Bank* yang masih merupakan satu-satunya lembaga yang memberikan kredit kepada pedagang. *De javasche Bank* tetap satu satunya lembaga perbankan yang melayani kebutuhan kredit jangka pendek untuk sektor perdagangan swasta. Sektor dalam urusan ekspor produksi milik pemerintah seperti NHM (*Nederland Handels Maatschappij*), tetap memberikan atau menyediakan kredit kepada swasta dengan menyediakan dana kepada individu swasta. Pada abad ke-19 *De Javasche Bank* sebenarnya ruang lingkup operasinya banyak di potong, dalam arti sebenarnya bisnis perbankan hanya dilakukan pada masa-masa awal didirikannya NHM, sehingga cadangan modal (perak atau emas) *Javasche Bank* sangat terbatas jumlahnya sehingga kegiatannya membatasi operasinya di Batavia saja. Ini dikarenakan NHM berperan penting dalam menangani atau menyediakan kredit kepada perusahaan dan perkebunan swasta yang jumlah lebih besar.

Kesimpulan dari buku ini khususnya pada bab 10, membahas tentang bagaimana peran bank-bank yang ada di Hindia-Belanda dalam mengatur ekonomi Hindia-Belanda, kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk pengeluaran uang kertas, mengatur cadangan emas, juga perak, dan penyedia/penyaluran kredit dapat dilihat dalam buku ini. Hal ini dapat menjadi acuan dalam penulisan ini memberikan gambaran demografi di Indonesia pada masa pemerintahan HindiaBelanda, dengan menggunakan data statistik seperti kependudukan dan statistik peningkatan ekonomi kolonial dalam berbagai sumber.

1.6.2 Landasan Konseptual

Buku yang berjudul *Nation-States and Money The past, present and future of national currencies*. Mata uang didefinisikan sebagai fenomena ekonomi yang juga memiliki aspek geografis, politik, sosial, dan budaya. Mata uang nasional dianggap sebagai simbol kedaulatan negara-bangsa, tetapi dalam praktiknya, penggunaannya tidak selalu eksklusif di dalam batas negara. Secara historis, sebagian besar negarabangsa berusaha mempertahankan mata uang yang berbeda, homogen, dan eksklusif dalam batas teritorial mereka. Mata uang nasional sering dianggap sebagai indikator yang jelas dari kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, mata uang tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang kuat dalam pembentukan dan keberlanjutan negara-bangsa.

Bank merupakan sebuah Lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kredit, pengaturan aliran uang, dan pengelolaan dana. Secara umum, bank dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti Bank Sentral yang dimana Bank Sentral pada umumnya merupakan suatu Lembaga yang bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengawasi sistem keuangan dan perbankan. dalam perkembangannya, peranan dan fungsi bank sentral sebagai pelaksana kebijakan moneter, mengatur perkreditan, dan mengawasi perbankan. peran bank sentral sangat penting khususnya untuk memelihara stabilitas keuangan, yang meliputi peran dalam memelihara dan menjaga kestabilan nilai dan stabilitas keuangan.

De Javasche Bank adalah bank yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1828 di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) sebagai bank sirkulasi. DJB memiliki peran utama dalam mengelola peredaran mata uang gulden Belanda dan menjalankan kebijakan moneter untuk mendukung ekonomi kolonial.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang ada didalam buku “ *penulis sejarah*” yang ditulis oleh Dias Pradadimara, dkk yang terdiri dari 6 tahap, yaitu:

1.7.1 Mengidentifikasi Permasalahan Sejarah

Pada tahap ini, peneliti sejarah menentukan dan merumuskan permasalahan atau pertanyaan sejarah yang akan dikaji. Permasalahan sejarah dapat berupa eksplorasi suatu peristiwa, proses, atau fenomena bersejarah. Peneliti dapat membaca literatur-literatur terkait dengan situasi ekonomi pada pasca kemerdekaan, penulis untuk memahami peran mata uang secara mendalam dalam konteks dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia Timur, khususnya di Makassar. bertujuan untuk mendeskripsikan mata uang dalam mempengaruhi struktur ekonomi yang terjadi di Makassar sebagai ibu kota Negara Indonesia Timur (NIT). Peneliti akan menggambarkan peran, kebijakan, dan dampak peredaran mata uang pada ekonomi Makassar dan wilayah sekitarnya.

1.7.2 Melakukan Pencarian Sumber

Data utama akan dikumpulkan melalui arsip-arsip kolonial, laporan resmi, dan surat kabar tentang jenis jenis mata uang yang beredar awal kemerdekaan yang

berkaitan dengan aktivitas ekonomi di Indonesia Timur. Sumber-sumber ini dapat diakses melalui lembaga seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Perpustakaan Nasional yang menyimpan koleksi koleksi mata uang serta laporan keuangan pada masa NIT. Teknik engumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen. Penulis akan melakukan penggalian data melalui penelusuran arsip dan dokumentasi terkait kebijakan DJB, Kebijakan Pemerintah Jepang (pada masa pendudukan),Kebijakan NICA, catatan ekonomi NIT, serta kebijakan pusat-daerah yang memengaruhi struktur ekonomi Makassar. Peneliti juga akan meninjau data statistik dan laporan keuangan yang relevan untuk memperoleh gambaran tentang situasi ekonomi pada masa tersebut, data dianalisis menggunakan teknik analisis sejarah, yang meliputi kritik sumber untuk memastikan keaslian dan relevansi sumber yang digunakan.

1.7.3 Melakukan Interpretasi:

Pada tahap ini, peneliti sejarah melakukan analisis dan penafsiran terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memahami makna, hubungan, dan konteks dari peristiwa atau fenomena sejarah yang dikaji.

1.7.4 Menerapkan Kritik

Kritik sumber terdiri dari pertanyaan kritis yang bertujuan untuk meragukan keaslian sumber sejarah, seperti apakah sumber yang diperoleh asli atau palsu. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pengkajian mendalam terhadap isi dari sumber yang telah dikumpulkan. Untuk melaksanakan tahap ini, diperlukan ilmu bantu yang dapat membantu dalam memahami sumber secara lebih mendalam dan objektif. Tujuan dari kritik sumber ini adalah untuk memastikan apakah sumber

yang diperoleh dapat dipercaya atau tidak, sehingga memungkinkan peneliti untuk membedakan antara informasi yang sah dan yang tidak, serta menjamin kualitas dan integritas hasil penelitian sejarah.

1.7.5 Penulisan Sejarah:

Pada tahap ini, peneliti sejarah menyusun hasil penelitian dan interpretasinya dalam bentuk tulisan sejarah yang terstruktur dan koheren. Penulisan sejarah melibatkan penyusunan narasi, analisis, dan argumentasi yang didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang ditemukan.

1.7.6 Menerapkan Sistem Bahasa Baku

Tujuan utama dari penulisan sejarah adalah untuk memperkaya literatur sejarah serta menjadi sarana komunikasi yang efektif kepada pembaca dengan cara yang jelas dan terstruktur. Penulisan sejarah yang sesuai dengan kaidah yang baku akan memudahkan pemahaman terhadap peristiwa sejarah yang dibahas, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai kejadian-kejadian tersebut. Dengan demikian, penulisan yang sistematis dan terorganisir akan membantu pembaca untuk memahami konteks dan makna dari setiap peristiwa sejarah yang diteliti, serta memperluas wawasan mereka tentang masa lalu.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I (Pendahuluan): Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Membahas permasalahan uang yang beredar sebelum berdirinya NIT

Bab III: Membahas mengenai kebijakan moneter Negara Indonesia Timur dan pilihan terhadap setiap mata uang yang beredar.

Bab IV: Menganalisis dampak dari bergabungnya NIT kedalam pemerintahan RIS

Bab V: (Penutup) menyajikan kesimpulan dari rumusan masalah yang dipaparkan di awal.

Struktur ini diharapkan dapat memberikan kerangka yang jelas dan sistematis dalam menyajikan tulisan mengenai ,“Penggunaan Mata Uang di Negara Indonesia Timur 1946-1950”.

BAB II

NEGARA-BANGSA DAN UANG

Pembahasan pada bab ini untuk mengantarkan permasalahan moneter pasca pendudukan Jepang setelah berakhirnya perang dunia ke-2, konteks sejarah akan diangkat mengenai peran perbankan dalam moneter Indonesia saat masih kolonial Hindia Belanda juga saat pendudukan Jepang serta berakhirnya pendudukan yang memasuki masa revolusi kemerdekaan setelah proklamasi. Bab ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai kerangka historis yang menjelaskan bagaimana dinamika politik, ekonomi, dan administrasi kolonial mempengaruhi kebijakan mata uang di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di Makassar yang akan menjadi pusat ekonomi dan pengendalian sirkulasi moneter dikarenakan kawasan yang strategis.

Pada masa kolonial, Makassar juga memainkan banyak peran penting dalam membantu perekonomian kolonial, seperti menjadi sektor jalur perdagangan, Lembaga perbankan yang aktif, serta administrasi pemerintahan kolonial, yang menjadikan status struktur administratif Makassar sebagai (*Afddeeling*). Lembaga perbankan saat itu yang berkantor di Makassar seperti *De Javasche Bank Agentschap Makassar N.V.* (DJB), *Nederlandsche Handels Maatschappij N.V.* (NHM), dan *De Escompto Bank N.V.*, bank bank tersebut yang mendominasi sirkulasi moneter pada saat itu, ada juga bank yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang tionghoa yang tidak memiliki nama bank yang spesifik. Bank sentral yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengendalian mata uang kolonial saat itu adalah DJB, pada bab ini akan menjelaskan fungsi perbankan masa kolonial yang

ada di Makassar dan peran utama DJB cabang Makassar dalam pengendalian mata uang.

Pada masa pendudukan Jepang situasi moneter terpaksa dikendalikan oleh pihak militer Jepang, Indonesia memasuki situasi moneter yang kacau. Pemerintah Militer Jepang telah memaksa penghentian operasional bank-bank kolonial dan memperkenalkan uang invasi Jepang yang tidak memiliki dasar cadangan emas yang jelas. Setelah kekalahan Jepang pada perang dunia ke-2 pada Agustus 1945, peredaran uang menjadi makin tidak terkendali karena munculnya tiga jenis uang yang berusaha berebut legitimasi: uang pendudukan Jepang, uang NICA yang dibawa Belanda dalam upaya mengambil alih kembali administrasi, dan uang Oeang Republik Indonesia (ORI) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik. Fragmentasi ini menyebabkan ketidakstabilan moneter yang serius, terlebih karena wilayah Indonesia tidak berada dalam satu otoritas pemerintahan tunggal. Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Timur berada dalam struktur kekuasaan yang berbeda-beda, dan masing-masing otoritas membawa sistem moneter sendiri. Pembahasan pada bab ini sangat penting dalam mengetahui akar permasalahan penggunaan mata uang di Makassar, perubahan-perubahan dalam sistem keuangan selama kurun 1945–1950 merupakan salah satu episode paling kompleks dalam sejarah moneter Indonesia sebuah periode ketika berbagai mata uang beredar secara bersamaan, lembaga-lembaga keuangan berada pada transisi kewenangan, dan institusi kolonial maupun republik berusaha mempertahankan legitimasi masing-masing melalui kontrol terhadap uang. Pembahasan pada bab ini juga untuk

mengetahui kondisi ekonomi dan politik di Makassar dan bagaimana sikap otoritas untuk mempertahankan mata uang tertentu setelah Perjanjian Linggarjati.

Secara keseluruhan, Bab II memberikan teori fungsi bank untuk pengenalan uang, juga memberikan gambaran historis mengenai kondisi moneter Indonesia khususnya di Makassar dalam masa transisi dari kolonial, pendudukan, dan pasca pendudukan yang terpengaruh dari ketidakstabilan moneter ketika tiga mata uang yang beredar secara masif. Point penting dalam pembahasan ini bagaimana kebijakan yang diambil pada setiap otoritas untuk mengatasi masalah penggunaan uang tersebut.

2.1 Peran Bank Sentral dalam Pengendalian Peredaran Uang

Bank sebenarnya memiliki fungsi yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dan orang lain, man pun dengan jalan memperedarkan alat tukar, bank juga memberikan semacam jasa seperti pinjaman berupa uang yang diawasi pengatur kredit. Bank umumnya melakukan fungsi seperti itu yang biasa disebut bank komersil dengan terget memberikan jasa ke masyarakat. Sedangkan bank sentral merujuk ke posisi yang tinggi dalam mengatur keuangan disebuah negara, yang lebih jelasnya memiliki fungsi dalam mengatur sistem moneter negara.¹⁵ Bank yang memiliki status kedudukan sentral ini menempatkan bank sentral bukan sekadar sebagai lembaga keuangan biasa, melainkan sebagai sumber uang primer

¹⁵ Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusaputri. (2018), *Bank dan lembaga keuanganI*, Jakarta: Mitra wacana Media. Hlm. 19.

bagi perbankan, pemerintah, maupun masyarakat luas. Kewenangan ini memberikan landasan hukum bagi bank sentral untuk mengatur volume uang yang beredar di masyarakat agar senantiasa berada dalam jumlah yang seimbang dengan kebutuhan riil perekonomian, guna menghindari guncangan nilai mata uang yang dapat merugikan stabilitas ekonomi nasional.¹⁶

Bank sentral dalam pengendalian jumlah uang yang beredar merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya kestabilan nilai mata uang, baik terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam laju inflasi, maupun terhadap mata uang negara lain yang terlihat pada nilai tukar. Otoritas moneter memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, yakni serangkaian tindakan terencana untuk memengaruhi variabel-variabel moneter seperti uang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, yang ditandai dengan inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang wajar.¹⁷ Hal yang paling utama yang dikelola bank sentral yaitu kendali mata uang, yang merupakan memegang peranan vital bagi keberlangsungan sebuah negara, Fungsi uang bagi negara tidak sekadar sebagai alat tukar *medium of exchange* atau satuan hitung *unit of account*, melainkan juga sebagai atribut kedaulatan dan alat pemersatu wilayah ekonomi.¹⁸ Uang dapat dipercaya oleh

¹⁶ Sadono Sukirno. (2008). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan. Hlm. 283

¹⁷ Sadono Sukirno. (2008). Hlm. 287.

¹⁸ Nawiyanto *et.al* (2024). *Rupiah Untuk Kedaulatan Negara*, Bank Indonesia Institute. Hlm. 14.

masyarakat luas bukan karena nilai intrinsik materialnya, melainkan karena adanya jaminan dari negara dan undang-undang yang menyertainya. Konsep ini, yang sering disebut sebagai *fiduciary money* atau uang kepercayaan, mensyaratkan adanya otoritas yang kredibel yang menjamin bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran, termasuk pembayaran pajak kepada negara. Masyarakat mengenal dan menerima uang karena adanya *legal tender laws* atau undang-undang mata uang yang memaksa penerimaan mata uang tersebut dalam yurisdiksi tertentu, serta keyakinan bahwa otoritas moneter mampu menjaga daya beli uang tersebut dari gerusan inflasi yang berlebihan.¹⁹

Pada era sekarang Jaminan terhadap nilai uang dalam sistem moneter modern tidak lagi didasarkan pada cadangan logam mulia yang biasa dikatakan *Gold Standard* (standar emas) secara penuh, melainkan pada kepercayaan terhadap kekuatan ekonomi negara dan kebijakan bank sentral dalam mengelola suplai uang. Ketika sebuah negara mencetak uang, negara tersebut pada dasarnya menerbitkan utang tanpa bunga yang harus diterima oleh publik. Kemampuan uang untuk mempertahankan nilainya sangat bergantung pada ketersediaan barang dan jasa dalam perekonomian serta disiplin bank sentral dalam tidak mencetak uang melebihi kebutuhan riil perekonomian. Oleh karena itu, kredibilitas bank sentral menjadi jaminan imajiner namun kuat yang membuat selembar kertas bernilai di mata masyarakat. Jika kepercayaan ini runtuh, seperti yang terjadi pada masa hiperinflasi, maka uang akan kehilangan fungsinya dan masyarakat akan kembali

¹⁹ Nawiyanto *et.al* (2024). Hlm. 17.

pada sistem barter atau menggunakan mata uang asing yang lebih stabil.²⁰ Uang tidak sekadar berfungsi sebagai alat tukar *medium of exchange* untuk mengatasi inefisiensi sistem barter yang mensyaratkan *double coincidence of wants*. Lebih jauh dari itu, uang berfungsi sebagai satuan hitung *unit of account* yang menstandarisasi nilai barang dan jasa, serta sebagai penyimpan nilai *store of value* yang memungkinkan transfer daya beli ke masa depan. Bagi negara, uang adalah instrumen vital untuk memobilisasi sumber daya. Melalui penciptaan dan pengaturan uang, negara dapat membiayai pengeluaran publik, memungut pajak secara efisien, dan mengelola utang negara. Tanpa mata uang yang berdaulat, kemampuan negara untuk mengendalikan kebijakannya akan sangat terbatas.²¹

Dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial, fungsi uang menunjukkan relasi ganda antara kepentingan politik dan kebutuhan ekonomi. Di satu sisi, peredaran uang diperlukan untuk menunjang aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan pasar kolonial yang terus berkembang. Namun di sisi lain, kebijakan moneter yang diterapkan tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Penerbitan dan pengendalian uang diarahkan untuk menjamin kelancaran

²⁰ Robert E. Wright (2012), *Money and Banking*, Washington: Saylor Foundation, ISBN 13: 9780982043080. Hlm. 49.

²¹ Gilbert, Helleinder, Eric.1999. *Nation States and Money The Past Present, and Future of National currencies*. Routledge Taylor and Francis Grup. Hlm. 6.

eksploitasi ekonomi, stabilitas administrasi kolonial, serta kepentingan perdagangan internasional yang menguntungkan negeri induk. Hal tersebut, pembahasan mengenai bank sentral dalam konteks kolonial tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai aktor utama dalam menentukan arah kebijakan moneter. Bank sentral kolonial berfungsi bukan hanya sebagai lembaga teknis keuangan, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang menghubungkan kepentingan politik negara dengan kebutuhan ekonomi pasar.

Sejak awal kemunculannya dalam sistem ekonomi modern, uang selalu berada dalam relasi yang erat dengan kekuasaan politik. Negara, sebagai otoritas tertinggi dalam suatu wilayah, memegang peranan sentral dalam menentukan bentuk, nilai, dan legitimasi uang yang beredar. Melalui kewenangan hukum dan administratif, negara menetapkan uang tertentu sebagai alat pembayaran sah, memaksakan penerimaannya, serta menggunakan uang sebagai sarana untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat.²²

2.1.1 Perkembangan Bank Sentral di Indonesia pada Masa Kolonial

Perekonomian Hindia Belanda pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memiliki karakteristik yang unik, yakni belum terbentuknya pasar uang dan modal yang mapan. Lembaga keuangan lokal pada masa itu belum cukup kuat untuk menampung kebutuhan investasi yang tumbuh pesat, sehingga ketergantungan pada

²² Gilbert, Helleinder, Eric. 1999. *Nation States and Money The Past Present, and Future of National currencies*. Routledge Taylor and Francis Grup. Hlm. 6.

aliran modal dari luar negeri sangat tinggi. Lanskap bank sentral di Indonesia memiliki akar yang dalam pada masa kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial, menyadari kekacauan moneter akibat beredarnya berbagai mata uang asing seperti Dolar Spanyol dan uang tembaga yang menghambat perdagangan, mendirikan *De Javasche Bank* (DJB) pada tahun 1828. DJB diberikan hak oktroi atau hak istimewa untuk menerbitkan uang kertas (bank sirkulasi) di Hindia Belanda. Pendirian ini bertujuan untuk menstandarisasi sistem moneter di bawah hegemoni Gulden Belanda dan memfasilitasi kepentingan dagang kolonial.²³ Meskipun DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi, ia pada dasarnya adalah badan usaha swasta yang berorientasi profit bagi para pemegang sahamnya di Belanda. Kebijakan moneter pada masa itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) dan eksploitasi sumber daya alam nusantara untuk keuntungan Kerajaan Belanda. DJB juga memainkan peran ganda, tidak hanya sebagai otoritas moneter tetapi juga memberikan kredit komersial kepada perusahaan-perusahaan perkebunan besar.²⁴

Bank sentral Hindia Belanda pada masa itu memiliki instrumen pengendalian yang terbatas, yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman kepada bank-bank lain. Namun, efektivitas kebijakan ini seringkali dipertanyakan. Bank-bank lain yang beroperasi di Hindia Belanda seringkali merupakan cabang dari bank internasional yang memiliki akses ke pasar modal di negara asalnya, sehingga

²³ Peter Creutzberg & Van Laanen (1987). *Perbankan, Sistem Kredit dan Nilai Tukar*. Dalam buku "Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia". Hlm. 339.

²⁴ Peter Creutzberg & J.T.M. Van Laanen (1987). Hlm. 344.

mereka tidak terlalu bergantung pada fasilitas diskonto DJB. Akibatnya, perubahan suku bunga diskonto oleh DJB tidak selalu diikuti oleh perubahan suku bunga pasar atau mempengaruhi perilaku pemberian kredit oleh bank-bank lain secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DJB memiliki status sebagai bank sirkulasi, kekuatannya dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan kredit tidak sekuat bank sentral dalam pengertian moder, yang lebih jelasnya DJB memainkan peran ganda, bisa menyalurkan kredit juga mengendalikan mata uang.²⁵ Meskipun mengedarkan uang kertas, DJB diwajibkan memelihara cadangan logam (emas dan perak) dengan persentase tertentu dari jumlah uang kertas yang dikeluarkannya untuk menjamin konvertibilitas uang tersebut. Aturan ini, yang dikenal sebagai sistem standar emas atau standar perak (atau bimetalisme pada periode tertentu), merupakan bentuk jaminan fisik bagi masyarakat terhadap nilai uang kertas DJB. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini juga membatasi fleksibilitas DJB dalam merespons kebutuhan likuiditas perekonomian, terutama saat terjadi krisis.²⁶

Perekonomian Hindia Belanda pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memiliki karakteristik yang unik, yakni belum terbentuknya pasar uang dan modal yang mapan. Lembaga keuangan lokal pada masa itu belum cukup kuat untuk menampung kebutuhan investasi yang tumbuh pesat, sehingga ketergantungan pada

²⁵ Peter Creutzberg & Van Laanen (1987). Hlm. 349.

²⁶ Peter Creutzberg & Van Laanen (1987). Hlm. 362.

aliran modal dari luar negeri sangat tinggi.²⁷ Sebelum Perang Dunia II, tidak ada institusi yang benar-benar terorganisir untuk mengatur transaksi kredit antara peminjam dan pemberi pinjaman, baik lewat bank maupun bursa saham. Kondisi kekosongan ini justru menempatkan DJB pada posisi yang sangat vital. DJB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengedarkan uang, namun juga menjadi pilar utama dalam menjaga kestabilan uang di tengah gejolak ekonomi yang digerakkan oleh kepentingan kolonial.²⁸

2.2 Pengaruh Jepang di Makassar

Invasi militer Jepang ke Hindia Belanda pada tahun 1942 tidak sekadar menandai perpindahan kekuasaan politik dari tangan Belanda, melainkan juga menjadi titik awal transformasi radikal dalam struktur ekonomi dan moneter wilayah tersebut. Makassar, sebagai pusat strategis di wilayah timur Nusantara, menjadi salah satu arena utama implementasi kebijakan moneter militer Jepang yang agresif. Jepang mendarat dan menguasai Makassar, langkah pertama yang mereka ambil dalam ranah ekonomi adalah melumpuhkan sistem keuangan kolonial Belanda. Seluruh bank milik Belanda, termasuk kantor cabang *De Javasche Bank* di Makassar, segera dilikuidasi atau diambil alih operasionalnya oleh militer.²⁹ Jepang membekukan aset-aset musuh dan melarang penggunaan mata uang Gulden

²⁷ Nawiyanto *et.al* (2024). Hlm. 59.

²⁸ Peter Creutzberg & J.T.M. Van Laanen (1987). Hlm. 352.

²⁹ Shibata Yoshisama. (1996). *The Monetary Policy In The Netherlands East Indies Under The Japanese Administration*. BKI: 152-6. Hlm 177

dalam transaksi resmi untuk memutus ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya.

Sebagai gantinya, pemerintah militer Jepang mendirikan “*Nanpo Kaihatsu Kinko*” atau biasa juga disebut *Southern Development Bank* “SDB” yang didirikan pada bulan April 1943³⁰ berfungsi sebagai bank sentral *de facto* untuk wilayah pendudukan di Asia Selatan, termasuk Indonesia. Di Makassar, yang berada di bawah administrasi Angkatan Laut Jepang “*Kaigun*”, SDB memainkan peran sentral dalam mendanai operasi militer dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur penunjang perang. Melalui SDB inilah, Jepang mulai memperkenalkan mata uang militer “*military scrip*” yang secara bertahap dipaksakan penggunaannya kepada masyarakat lokal.³¹ Proses pergantian mata uang dari Gulden Hindia Belanda ke uang militer Jepang tidak terjadi secara sertamerta, melainkan melalui tahapan yang kalkulatif. Pada awalnya, Jepang mengizinkan penggunaan uang Gulden yang masih beredar untuk menjaga kelancaran transaksi pasar, namun dengan nilai tukar yang ditetapkan secara sepihak: satu Gulden setara dengan satu Rupiah Jepang (paritas 1:1). Kebijakan paritas ini bertujuan untuk mencegah kepanikan ekonomi sekaligus memudahkan transisi psikologis masyarakat terhadap uang baru.³² Seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menarik uang Gulden dari peredaran melalui berbagai mekanisme,

³⁰ Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 180.

³¹ Rasyid Asba, et.al. (2019). Pusat Ekonomi Maritim Makassar peran Bank Indonesia di Sulawesi Selatan, Jakarta: Bank Indonesia Institute. Hlm. 126

³² Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 184.

seperti pembayaran pajak, simpanan wajib, dan transaksi di toko-toko yang dikuasai Jepang “*kumiai*”. Uang Gulden yang berhasil ditarik kemudian dimusnahkan atau disimpan sebagai cadangan, digantikan oleh uang kertas terbitan pemerintah Jepang yang dikenal sebagai "uang invasi". Uang invasi ini dicetak dalam berbagai pecahan, mulai dari sen hingga rupiah, dengan desain yang menonjolkan simbol-simbol budaya lokal seperti pohon pisang, rumah adat, dan wayang, namun tetap menyisipkan propaganda kemakmuran bersama Asia Timur Raya.³³

Kebijakan pencetakan uang Jepang di Makassar sangat ekspansif dan tidak didukung oleh cadangan emas atau komoditas riil. Uang dicetak semata-mata berdasarkan kebutuhan pembiayaan perang (*war finance*), tanpa mempertimbangkan keseimbangan suplai dan permintaan uang di pasar. Akibatnya, jumlah uang yang beredar melonjak drastis, jauh melampaui ketersediaan barang kebutuhan pokok yang semakin langka akibat blokade sekutu.³⁴ Uang yang nilainya tergerus oleh inflasi, mata uang Jepang memegang peranan yang tak tergantikan dalam struktur ekonomi Makassar selama masa pendudukan.³⁵ Masyarakat Makassar banyak merespons situasi ini dengan kembali ke sistem barter atau menggunakan komoditas bernilai tinggi seperti emas, perhiasan, atau kain sebagai alat tukar alternatif. Namun, untuk transaksi formal dengan pemerintah militer,

³³ Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 185.

³⁴ Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 185.

³⁵ Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 187.

uang Jepang tetap menjadi instrumen wajib. Hal ini menciptakan dualisme ekonomi: ekonomi formal yang didominasi uang Jepang yang inflatoir, dan ekonomi informal (pasar gelap) yang menggunakan barang riil atau mata uang asing yang disembunyikan.³⁶

2.2.1 Karakteristik Spesimen Uang Jepang

Masa pendudukan Jepang, jumlah mata uang di Hindia Belanda beredar sangat masif. Ini dikarenakan Jepang bukan hanya sebatas pendudukan wilayah dengan militer, tetapi juga menggunakan mata uang, sebelum *Nanpo Kaihatsu Ginko* (NKG) didirikan, pemerintah militer Jepang mengeluarkan mata uang invasi “*Invasion Money*” atau uang militer, uang tersebut secara khusus dibuat untuk diedarkan di Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang sebelum masuk ke Indonesia. Pada uang tersebut masih menggunakan satuan gulden dan penggunaan bahasa Belanda agar masyarakat Indonesia tak asing dengan uang yang Jepang bawa saat itu. Terdapat tujuh denominasi mata uang Jepang tersebut,³⁷ berikut karakteristik spesimen uang Invasi Jepang:


³⁶ Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 188.

³⁷ Rasyid Asba (2019), *et.al.* Hlm.130.

Tabel 1
Jenis Uang Invasi Jepang

No.	Spesimen Uang	Keterangan
1		Pecahan 1 Gulden
2		Pecahan 1/2 Gulden
3		Pecahan 5 Gulden

No.	Spesimen Uang	Keterangan
4		Pecahan 10 Gulden
5		Pecahan 1 Sen
6		Pecahan 5 Sen

No.	Spesimen Uang	Keterangan
7		Pecahan 10 Sen

Uang Invasi Diterbitkan Pada Tahun 1942 Dan Dicitak Oleh: Djakarta Inatsu Kodjo³⁸

Terdapat tujuh denominasi mata uang Jepang tersebut, yakni 1 gulden, ½ gulden, 5 gulden, 10 gulden, serta 1 sen, 5 sen, dan 10 sen. Uang yang dilekatkan tanda *De Japansche Regeering Bataalt aan Toonder* yang berarti “Pemerintah Jepang membayar kepada sang pembawa”, Uang yang didistribusikan oleh tentara Jepang melalui jalur kapal ketika mendarat di Indonesia.³⁹ Uang militer ini dicetak di Jepang sebelum invasi dan disebar oleh pasukan pendudukan sebagai alat

³⁸ Numista. “Netherlands Indies Japanese Occupation” dalam <https://en.numista.com/catalogue/index.php?e=indonesia&r=Indonesia&st=all&ca=t=y&im1=&im2=&ru=&ie=&ca=3&no=&v=&a=&dg=&i=&b=&m=&f=&t=&t2=&w=&mt=&u=&g=>. Diakses pada tanggal 26 9 November 2025, pukul 21:33 WITA. Penjelasan: uang gulden tersebut memiliki masing-masing ciri khas dan warna yang berbeda.

³⁹ Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 189.

pembayaran logistik perang dan gaji tentara. Tujuannya adalah untuk membiayai operasi militer tanpa harus membebani anggaran pusat Jepang.⁴⁰


Memasuki tahun 1943, seiring dengan stabilnya pendudukan dan upaya untuk mengintegrasikan ekonomi wilayah selatan, Jepang memperkenalkan uang seri baru yang diterbitkan oleh NKG. Uang ini sering disebut sebagai "uang pisang" karena gambar pohon pisang yang ikonik pada pecahan sepuluh Rupiah. Berbeda dengan seri awal, uang ini menggunakan satuan Rupiah (Roepiah) untuk mendekati diri dengan masyarakat lokal dan menghapus jejak kolonial Belanda. Desainnya lebih variatif, menampilkan pemandangan alam Indonesia, rumah adat, dan wayang, yang sarat dengan propaganda kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Uang ini dicetak dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan uang Gulden Belanda, sehingga sangat rentan terhadap pemalsuan dan kerusakan fisik akibat iklim tropis.⁴¹ Berikut karakteristik spesimen uang yang diterbitkan NKG:

⁴⁰ Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 190

⁴¹ Shibata Yoshisama. (1996). Hlm 190

Tabel 2
 Jenis uang yang didistribusi NKG

No.	Jenis Uang	Keterangan
1		Pecahan 1 Rupiah
2		Pecahan 5 Rupiah
3		Pecahan 10 Rupiah

No.	Jenis Uang	Keterangan
4		Pecahan 100 Rupiah

Uang Didominasi Dengan Pecahan 1 Rupiah, 5 Rupiah, 10 Rupiah, 100 Rupiah. Uang Diterbitkan Pada Tahun 1943 Oleh NKG Dan Distribusikan Pada Tahun 1944 Yang Dicitak Oleh: Djakarta Inatsu Kodjo.⁴²

NKG pada saat itu sebagai bank sirkulasi memusatkan kegiatannya pada sirkulasi uang-uang Jepang yang ada di Indonesia. NKG berkantor pusat di Tokyo, kantor pusat kegiatan operasionalnya di Indonesia, berada di Batavia. NKG membuka kantor cabang di beberapa kota yang ada di Indonesia yaitu Medan, Palembang, dan Padang. Kantor-kantor yang digunakan NKG sebelumnya adalah kantor DJB yang di ambil alih oleh Jepang, kantor DJB di Makassar tidak bernasib seperti kantor DJB yang ada di Jawa dan Sumatera yang digantikan oleh NKG, kantor DJB Makassar bertindak sebagai *Taiwan Shomin Ginko* atau *Taiwan Bank*. Dapat dikatakan NKG hanya menjalankan operasionalnya di wilayah Jawa dan

⁴² Numista. "Netherlands Indies Japanese Occupation" dalam <https://en.numista.com/catalogue/index.php?e=indonesia&r=Indonesia&st=all&ca=t=y&im1=&im2=&ru=&ie=&ca=3&no=&v=&a=&dg=&i=&b=&m=&f=&t=&t2=&w=&mt=&u=&g=>. Diakses pada tanggal 26 9 November 2025, pukul 21:33 WITA. Penjelasan: uang gulden tersebut memiliki masing-masing ciri khas dan warna yang berbeda.

sumatera saja, ini dikarenakan perbedaan penguasaan wilayah oleh militer Jepang pada saat itu. Indonesia bagian timur dikuasai oleh Angkatan laut, sedangkan Jawa dan Sumatera dikuasai oleh Angkatan darat. Hal tersebut menyebabkan perbedaan alur koordinasi antara satuan militer lainnya. Akan tetapi tugas yang dijalankan oleh kedua bank tersebut tidak berbeda, hanya saja penguasaan militer saja.⁴³ Peredaran uang NKG di Makassar awalnya sangat sedikit, di pertengahan 1943 jumlahnya ditambahkan 87 Gulden, uang tersebut ditukarkan yang berasal dari DJB yang belum di edarkan pada saat diambil alih Jepang.⁴⁴

2.2.2 Kemerdekaan Indonesia dan Berakhirnya Pengaruh Jepang di Makassar

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka fase transisi kekuasaan di Sulawesi Selatan yang tidak berlangsung secara linier. Di Makassar, perubahan otoritas pasca-perang tidak segera diikuti oleh terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia yang efektif, melainkan diawali oleh kehadiran pasukan Sekutu. Dalam konteks Indonesia Timur, tanggung jawab militer Sekutu dijalankan oleh Angkatan Darat Australia, *Australian Military Forces* (AMF), yang mendarat di Makassar pada 21 September 1945. Kehadiran pasukan Australia ini bertujuan utama menerima penyerahan Jepang, menjaga keamanan, serta mengatur administrasi

⁴³ Rasyid Asba (2019), *et.al.* Hlm.133.

⁴⁴ Rasyid Asba (2019), *et.al.* Hlm.132.

sementara pasca-perang.⁴⁵ Proses masuk dan bekerjanya *Netherlands Indies Civil Affairs* (NICA) di Makassar berlangsung secara gradual dan tidak serentak di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selama beberapa bulan pertama pasca-kedatangan Sekutu, otoritas administratif berada dalam situasi transisional, di mana kekuasaan militer Australia menjadi penentu utama, sementara NICA berusaha menata kembali struktur pemerintahan kolonial yang sempat terhenti selama pendudukan Jepang.⁴⁶ Kondisi ini membentuk kerangka awal bagi kebijakan-kebijakan NICA di bidang ekonomi dan moneter, termasuk upaya menegakkan kembali kendali administrasi Belanda melalui pengaturan mata uang dan sistem keuangan sementara yang dibawah kendali NICA.⁴⁷

Kekosongan kekuasaan yang terjadi pasca menyerahnya Jepang segera dimanfaatkan oleh Belanda untuk masuk ke bekas wilayahnya, pasukan sekutu memasuki kewilayah bekas pendudukan jepang untuk menjaga keamanan, *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA), ikut serta dengan tujuan menegakkan kembali kendali kolonial.⁴⁸ Kedatangan NICA di Makassar membawa agenda pemulihan ketertiban ekonomi yang agresif namun penuh tantangan. Salah

⁴⁵ M.C. Ricklefs & D.G. Chandler (1986). *Australia Hundred Days in South Sulawesi*, Dalam buku "Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essay in Honour of J.D. Legge,". Hlm. 206.

⁴⁶ M.C. Ricklefs & D.G. Chandler (1986). Hlm. 219

⁴⁷ Oey Beng To (1991), *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. . Hlm. 18.

⁴⁸ M.C. Ricklefs (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 429.

satu langkah prioritas NICA adalah untuk mengembalikan kestabilan moneter, dengan cara menarik uang Jepang dari peredaran dan menggantikannya dengan mata uang baru, *NICA-gulden*. Langkah kebijakan ini untuk menghapus jejak pendudukan Jepang sekaligus menegakkan kembali kedaulatan moneter Belanda.⁴⁹

NICA berhasil menguasai Makassar pada tahun 1946, Bersama pasukan sekutu yang representasi mereka bertanggung jawab mengamankan keamanan pasca perang.⁵⁰ Upaya belanda saat itu adalah untuk melakukan upaya pemulihan kembali struktur kolonial bekas wilayah *Gouvernement van Celebes*.⁵¹

2.3 Pembentukan Negara Indonesia Timur

Kondisi keuangan pada tahun 1946 yang dialami kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda menjadi semakin terpuruk, dikarenakan pemerintah Republik Indonesia sendiri menghadapi masalah pendapatan yang sangat terbatas untuk membiayai aparatur negara dan membiayai perang gerilya melawan tentara Belanda, namun pada saat yang sama pihak Belanda juga membutuhkan dana yang kawatir membangun kembali negara bekas koloninya, yang dimana Belanda juga kesulitan keuangan pasca perang dunia ke II.⁵² Seiring berjalannya waktu ketegangan antara militer Republik dan Belanda, Van Mook mengumumkan keputusannya untuk menghapuskan keadaan darurat yang terjadi di wilayah *Groote*

⁴⁹ Rasyid Asba (2019), *et.al.* Hlm.142.

⁵⁰ Rasyid Asba (2019), *et.al.* Hlm.141.

⁵¹ Rasyid Asba (2019), *et.al.* Hlm.141.

⁵² Luiten V. Zanden & Daan Marks. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800-2010*. Jakarta; Buku Kompas, 2012. Hlm 280.

Oost (Timur Besar), kecuali daerah Bali dan Kalimantan, disaat itu juga akan diadakannya Konferensi yang tentunya akan menjadi pembicaraan penting yang dimana Van Mook akan memprakarsai dan juga merancang pembaharuan tata pemerintahan, ketatanegaraan, dan perkembangan politik. Pada tanggal 15 peserta konferensi telah hadir di Malino, Sulawesi Selatan, yang dimana konferensi ini dinamakan Konferensi Malino.⁵³



Gambar 1: *Luitenant-Gouverneur-Generaal dr. H.J. van Mook opent de vergadering van de Malino..*

Sumber: KITLV. “Luitenant-Gouverneur-Generaal dr. H.J. van Mook opent de vergadering van de Malino” <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2012469>. Diakses pada tanggal 03 Juli 2025 pukul 01:43 WITA.

Konferensi Malino yang diadakan pada tanggal 16 Juli 1946. memustuskan dengan suara bulat dalam pembangunan kembali ketatanegaraan di wilayah Hindia

⁵³ Ide Anak Agung Gde. (1985). *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 112.

Belanda dulu, Van Mook berpendapat pembentukan suatu federasi Negara Indonesia Serikat ini yang terdiri dari Jawa, Sumatra, Timur besar, dan Kalimantan, wilayah-wilayah ini akan kembali di kontrol sementara oleh NICA serta sekutusekutunya.⁵⁴ Perumusan pembentukan Negara Indonesia Serikat ini menyetujui ditunjuknya tujuh orang yang merupakan suatu badan dengan tugas untuk bersamasama merundingkan dengan wakil-wakil pemerintah Hindia Belanda, hal yang menyangkut pembaharuan susunan ketatanegaraan di Timur Besar, Kalimantan, Riau, Bangka, dan Belitung. Anggota yang ditunjuk oleh konferensi saat itu ialah:

1. Tjokorde Gde Rake Soekawati (Bali)
2. Nadjamuddin Daeng Malewa (Celebes)
3. E. D. Dengah (Minahasa)
4. Kapten Tahja (Maluku Selatan)
5. Ibrahim Sedar (Kalimantan)
6. Oeray Saleh (Kalimantan barat)
7. Dr. Liem Tjæ Le (Bangka)

Perumusan Negara Indonesia Serikat diharuskan untuk mewujudkan pengendalian peralihan ketatanegaraan, sistem ekonomi, dan sosial untuk persiapan Negara Indonesia, Persiapan ini Konferensi Malino menyatakan keinginannya untuk meneruskan kerja sama antara Belanda dan Negara Indonesia Serikat pada

⁵⁴ Ide Anak Agung Gde, (1985). Hlm. 115.

saat berakhirnya masa peralihan.⁵⁵ Keinginan lain juga yang dibicarakan dalam konferensi, yang dimana Indonesia dan Belanda ingin adanya hubungan timbal balik yang ditetapkan suatu piagam yang akan dibicarakan dalam mewujudkan pembangunan kedepannya.⁵⁶ Konferensi Malino yang diadakan dapat dikatakan akan adanya pembentukan sistem ketatanegaraan baru juga sistem perekonomian yang macet hal ini akan diperbaiki pasca Pendudukan Jepang dan Perang Dunia ke 2. Perundingan antara Komisaris Jenderal Dr. Ir. W. Schermerhorn, letnan Jenderal Van Mook dan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Sutan Sjahrir yang akan dimulai bulan Oktober di Jakarta dan kemudian diteruskan di suatu tempat di pegunungan Cirebon yang bernama Linggarjati. Perundingan tersebut dapat menghasilkan suatu naskah persetujuan di antara kedua belah pihak dan oleh karena persetujuan itu dapat dicapai di Linggarjati, maka dalam sejarah persetujuan tersebut terkenal dengan sebutan Perjanjian Linggarjati.⁵⁷ Persetujuan linggarjati itu kemudian ditandatangani oleh Prof. Schermerhorn dan Sutan Sjahrir pada tanggal 15 November 1946 di kediaman Sutan Sjahrir di Jakarta. Isi dari pokok perundingan tersebut adalah pengakuan dari pihak Pemerintah Belanda terhadap kekuasaan *de facto* yang dimana paling terpenting yaitu:

⁵⁵ Ide Anak Agung Gde, (1985). Hlm. 115.

⁵⁶ Ide Anak Agung Gde, (1985). Hlm. 116.

⁵⁷ Ide Anak Agung Gde, (1985). Hlm. 118.

Meliputi pulau Jawa, Madura, dan Sumatra. Daerah-daerah yang sebelumnya telah diduduki oleh tentara Belanda dan Sekutunya di wilayah tersebut akan dikembalikan kepada kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. (Pasal 1)

Dimufakati bahwa pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan Belanda akan bekerjasama untuk mewujudkan dalam waktu yang singkat pembentukan Negara Indonesia Serikat yang demokratis dan berdaulat berdasarkan sistem federal. (Pasal 2)

Wilayah Negara Indonesia Serikat akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda dahulu. (Pasal 3)

Bahwa bagian-bagian Negara Indonesia Serikat adalah Republik (Jawa, Madura, dan Sumatra), Kalimantan dan Timur Besar. (Pasal 4).

Sebagai kepentingan bersama dapat dianggap hal-hal mengenai: urusan luar negeri, pertahanan, masalah keuangan, dan ekonomi dan kebudayaan. (Pasal 7)

Pokok-pokok penting perjanjian linggarjati ini telah disetujui oleh Sutan Sjahrir dan Schermerhron pada tanggal 15 Oktober 1946, hal ini diharapkan kedua belah pihak akan dapat menyelesaikan jalan keluar dari kemacetan setiap sektor bidang salah satunya keuangan dan ekonomi dan penyelesaian masalah Indonesia dapat segera dikendalikan.⁵⁸ Seiring berjalannya waktu akan diadakannya Konferensi Denpasar pada bulan Desember yang mengharuskan selesai selambatlambatnya pada tanggal 24 Desember 1946. Tentunya dalam konferensi Denpasar pembicaraan dipusatkan pada masalah pembentukan susunan

⁵⁸ Ide Anak Agung Gde, (1985). Hlm. 134.

ketatanegaraan di Wilayah Timur Besar yang diaman sudah tersedia suatu rencana juga rancangan Negara Timur Besar. Seperti halnya pemilihan Kepala negara, penetapan badan pemerintah yang berpusat di Makassar, dan penyempahan negara yang baru dipilih. Konferensi Denpasar menyatakan Pembentukan Negara Indonesia Timur telah diterima, ketua konferensi menyatakan Tjokorde Gde Rake Soekawati yang menjadi kepala negara yang baru saja disahkan diberi pangkat presiden. Pada tanggal 13 Januari 1947 Nadjamoedin Daeng Malewa yang menjabat sebagai perdana menteri menyusun Kabinet yang terdiri dari Sembilan menteri yang masing-masing mengepalai satu kementrian, M. Hammelink sebagai *Agentschap De Javasche Bank* menigisi kursi kementrian keuangan Negara Indonesia Timur.⁵⁹ Menimbang hal tersebut, Van Mook menjalankan program politiknya di pembentukan Indonesia federal yang negara bagian (serikat) dibawah kontrol Belanda. Dalam konteks demikian wilayah Indonesia Timur, Khususnya Sulawesi Selatan, Van Mook menganggap sangat potensial untuk mengendalikan perekonomian, selain itu kehadiran pasukan sekutu juga memudahkan Belanda untuk mengambil alih kekuasaan secepatnya.⁶⁰

⁵⁹ Ide Anak Agung Gde, (1985). Hlm. 182

⁶⁰ Rasyid Asba, et.al. (2019). Pusat Ekonomi Maritim Makassar peran Bank Indonesia di Sulawesi Selatan,. Jakarta: Bank Indonesia Institute. Hlm. 148.



Gambar 2: Peta Negara Indonesia Timur

Sumber: KITLV. “Indonesia Timoer standplaatsen artsen” dalam <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2012469>. Diakses pada tanggal 03 Juli 2025 pukul 01:43 WITA.

Wilayah Negara Indonesia Timur mengikuti administrasi pemerintah Hindia Belanda, wilayah Timur Besar, yang dikecualikan Keresidenan *Nieuw Guinea*. Wilayah administrasi *afdeeling* (Bagian) yaitu Keresidenan *Zuid-Celebes*, *Nord-Celebes*, *Molukken*, Bali-Lombok dan Timor. Wilayah ini akan masuk dalam administrasi NIT, yang berpusat di Makassar.⁶¹

⁶¹ Ide Anak Agung Gde (1985). Hlm 184.